

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar belakang**

Indonesia merupakan negara majemuk, yang memiliki 1340 etnis dan budaya yang terbentang dari sabang sampai merauke. Negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah mulai dari emas, perak, tembaga, hutan dan laut, dsb. Tidak hanya alam saja yang melimpah ruah, penduduk asli Indonesia sendiripun sangat begitu menghargai kearifan budaya di daerahnya. Ritual-ritual kebudayaan, norma-norma budaya, kesenian, adat istiadat masih tetap dilakukan dan dijaga sebagai upaya untuk melestarikan kebudayaan.

Bagi orang beragama perbedaan merupakan anugerah namun bagi kaum pemikir perbedaan merupakan hal yang perlu untuk diwaspadai, karena perbedaan sangat rentan sekali memicu terjadinya konflik. Hal itu, menjadikan dasar bagi bapak pendiri bangsa ini untuk membuat suatu landasan sistem negara atau ideologi bangsa sebagai alat pemersatu. Dari proses dialektika bung Karno, maka muncullah semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” (berbeda-beda namun tetap satu tujuan) dan Pancasila yang di dalamnya berisikan ketuhanan, nasionalisme, humanisme, demokrasi dan keadilan sosial.

Tidak hanya pada sendi kebudayaan bangsa Indonesia ini saja, dalam catatan sejarah demokrasi di Indonesia secara konstitusional melahirkan sistem multi partai. Berdirinya institusi partai dikehendaki bangsa ini agar terlahirnya kesejahteraan dan pendistribusian keadilan hingga ke pelosok daerah. Di Indonesia partai politik dibangun atas kesadaran bersama tentang Indonesia yang lebih baik. Secara visi dan misi partai politik di Indonesia memiliki unsur Nasional Kebangsaan dan Nasional Keagamaan.

Perebutan kekuasaan di tingkat nasional maupun daerah dan cara pandang yang berbeda menjadikan masing-masing partisipan partai politik saling berkompetisi untuk meyakinkan publik. Membangun kepercayaan publik partai politik beserta partisipannya sering melakukan langkah-langkah dengan cara apapun, tak jarang juga menimbulkan perilaku agresi untuk menjatuhkan lawan politiknya.

Sejarah Indonesia mencatat bahwa gejolak konflik horizontal ini sering terjadi ketika memasuki pesta demokrasi atau pemilihan umum. Pada tahun 2014 hingga tahun ini tidak sedikit orang yang terlibat dalam

pertikaian yang disebabkan ketidakpuasan salah satu kelompok atas hasil pemilihan. Seperti kasus pilkada di intan jaya papua, setidaknya tiga orang meninggal dunia, puluhan warga luka-luka dan belasan rumah dibakar karena pendukung dari paslon yang kalah tidak terima dan menganggap ada kecurangan. Di Kalimantan utara misalnya, para pendukung salah satu kandidat pilkada kaltara merusak dan membakar kantor KPU karena pihak KPU mengulur penghitungan suara hingga malam hari, (cnnindonesia.com). Hal tersebut diatas menjadikan gambaran perilaku agresi yang terjadi pada partai politik dan membantu mengumpulkan kajian dari agresi.

Baron dan Byrne (1994) menjelaskan bahwa agresi merupakan perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Agresi bukan hanya perilaku pemukulan, menendang, merusak, tapi menghujat, menyindir juga termasuk dari perilaku agresi. Korban agresi ini akan merasakan sakitnya secara fisik maupun psikologis.

Hal sama yang dilakukan oleh Atkinson (2001) agresi dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang ditujukan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun verbal. Dalam hal ini, jika menyakiti orang lain karena unsur ketidaksengajaan, maka perilaku tersebut tidak dikategorikan sebagai perilaku agresi. Rasa sakit akibat tindakan medis misalnya, walaupun sengaja dilakukan bukan termasuk agresi. Sebaliknya, niat menyakiti orang lain tetapi tidak berhasil, hal ini dapat dikatakan sebagai perilaku agresi.

Pada fenomena yang terjadi saat pemilu adalah agresi yang dilakukan oleh partisipan partai politik. Partisipan partai politik yang kalah dalam pemilu meletakkan agresi pada selain partainya, baik partai lain maupun pemerintah. Karena dorongan frustrasi yang kuat memunculkan perilaku agresi untuk merusak dan menyerang siapapun sebagai objek sumber rasa kecewa dan tak memperdulikan norma-norma sosial.

Konflik seringkali mendasari munculnya perilaku agresi antar kelompok dan konflik antar kelompok seringkali dipicu oleh keadaan *in group vs out group* sehingga anggota kelompok diwarnai oleh perasaan prasangka (Helmi & Soedardjo, 1998). Salah satu teori prasangka adalah *realistic conflict theory* yang memandang prasangka berakar dari kompetisi sejumlah kelompok sosial terhadap sejumlah komoditas maupun peluang, apabila kompetisi berlanjut maka masing-masing anggota akan memandang anggota kelompok lain sebagai musuh, sehingga jika terdapat isyarat agresi maka perilaku agresi akan muncul (Baron & Byrne, 2004)

Kompetisi dalam merebut kekuasaan sebagai pemimpin di negeri ini mau tidak mau seseorang dalam kelompok atau partai politik akan berjuang

sepenuh jiwa agar dapat memenangkan kontestasi politik tersebut. Seperti teori realitas konflik yang sudah dijelaskan di atas, bahwasanya hal mendasar dari konflik realitas ialah persaingan dan kompetisi yang dimana akan ada partai politik yang menang dan kalah.

Pada kontestasi pemilu tahun 2014 lalu ada dua kelompok koalisi partai politik yang saling berkompetisi. Ada KMP (Koalisi Merah Putih) yang mengusung Bapak Prabowo-Hatta dan ada KIH (Koalisi Indonesia Hebat) yang mengusung Bapak Jokowi-JK dan kedua partai politik tersebut saling membangun strategi untuk menjadi presiden dan wakil presiden di negeri ini.

Partisipan partai politik baik di pusat ataupun daerah dengan keras mengkampanyekan kedua paslon tersebut, tak jarang dari dua kelompok tersebut mengalami gesekan dan memunculkan perilaku agresi. Seperti kasus kericuhan pendukung Prabowo dan Jokowi di Bantul Yogyakarta 24 juni 2014, karena kericuhan tersebut fasilitas umum dan rumah warga rusak (Nasional.Tempo.id). Dengan demikian, prasangka yang ada di dunia ini berasal dari adanya kenyataan untuk bersaing (Olzak dan Nagel, 1986: Taylor dan Moghaddam, 1994).

Mengenai hal tersebut, terdapat dua sumber ketidakpuasan yang berbeda, deprivasi egoistik, suatu perhatian terhadap kepentingan diri sendiri, dan deprivasi fraternal, suatu perhatian terhadap kepentingan kelompok (Runciman, 1966). Perbedaan ini sangat penting untuk teori tentang persaingan yang menimbulkan prasangka. Seseorang atau partisipan partai politik tidak ingin kepentingannya dalam mendukung partai politik dikalahkan oleh partisipan partai lainnya. Sama halnya dengan Partai besar tidak ingin kalah dengan partai politik baru dan sebaliknya.

Salah satu bentuk gejala kejiwaan, agresi pastilah mempunyai penyebab tertentu. Dalam peristiwa konflik antar partisipan Partai Politik ini, salah satu penyebab dari munculnya perilaku agresi adalah prasangka dari dua atau lebih kelompok pada partisipan partai politik yang berbeda tersebut. Baron & Byrne (2004) mendefinisikan prasangka sebagai sebuah sikap (biasanya negatif) terhadap anggota kelompok tertentu, semata berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Prasangka merupakan salah satu fenomena yang hanya bisa ditemui dalam kehidupan sosial. Seseorang tidak mungkin berprasangka bila tidak pernah mengalami kontak sosial dengan individu lain, di samping itu prasangka memiliki fungsi *heuristik* (jalan pintas), yaitu langsung menilai sesuatu tanpa memprosesnya secara terperinci dalam alam pikiran (kognisi). Gunanya adalah agar kita tidak

terlalu lama membuang waktu dan energi untuk sesuatu yang telah terlebih dahulu kita ketahui dampaknya (Sarwono, 2006). Masalahnya, sering sekali orang berprasangka secara berlebihan sehingga orang tersebut tidak rasional lagi dan akhirnya membuat keputusan yang keliru.

Adanya berbagai kepentingan yang sama dari kelompok yang berbeda di atas dapat menyebabkan munculnya prasangka pada tiap-tiap kelompok, dimana prasangka tersebut akan meningkatkan kecenderungan untuk berperilaku agresi pada kelompok lain. Sejalan dengan hal ini Jaspars & Warnaen (1982), mengatakan bahwa prasangka seringkali merupakan sumber konflik antar kelompok.

Berdasarkan penjelasan diatas, pengaruh prasangka dengan perilaku agresi sering memicu terjadinya konflik, maka peneliti ingin mengungkap kembali apakah ada hubungan prasangka dengan perilaku agresi pada partisipan Partai Politik.

**B. Rumusan masalah**

Apakah terdapat hubungan antara prasangka dengan perilaku agresi pada partisipan partai Politik ?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara prasangka dengan perilaku agresi pada partisipan Partai Politik

**D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Bagi masyarakat pada umumnya, dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu psikologi sosial.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi partisipan partai politik, penelitian ini diharapkan dapat membantu para partisipan politik untuk mengetahui macam-macam perilaku agresi yang dipengaruhi oleh prasangka dalam suatu kelompok

b. Bagi masyarakat pada umumnya, hasil dari penelitian ini membantu masyarakat untuk mengetahui tentang prasangka dan perilaku agresi yang terjadi saat pemilu. Memberikan kesadaran pada masyarakat luas bahwa prasangka dan perilaku agresi adalah

suatu hal yang merugikan bagi persatuan dan kesatuan, oleh karena itu diharapkan masyarakat dapat mereduksi perilaku-perilaku merugikan tersebut

- c. Bagi ilmuwan atau peneliti, data hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pembandingan maupun referensi pada penelitian sejenis yang dilakukan di masa yang akan datang.